

**EVALUASI JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH DI SMP NEGERI KOTA
YOGYAKARTA**

Daris Yulianto

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) "AAN" Yogyakarta

Email: darisaan79@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to describe the evaluation of the Regional Education Guarantee (JPD) program at the Yogyakarta City Junior High School. This research method uses a qualitative method with a descriptive approach and the CIPP Stufflebeam evaluation model. Data analysis techniques using analysis of Miles and Huberman. The results of the study describe the implementation of JPD using the CIPP model, the criteria for context and process are not optimal. The problem in context is that the community uses the KMS card for the purpose of entering their favorite school and the inaccuracy of the target. The criteria for the learning process are found to be weak enthusiasm for learning and students are not ready to learn at school. Meanwhile, the criteria for input and product are considered good. Researcher recommend that the JPD program be continued with improvements.

Keyword: *Evaluation; Education Guarantee; CIPP.*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara Indonesia. Akses masyarakat terhadap pendidikan merupakan amanah yang harus dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan adalah menanamkan pengetahuan/pengertian, pendapat dan konsep-konsep, mengubah sikap dan persepsi, menanamkan tingkah laku/kebiasaan yang baru (Notoatmodjo, 2003).

Tingkat kemiskinan di DIY pada tahun 2015 hingga tahun 2019 memang cenderung menurun, tetapi angka tersebut masih tergolong tinggi dari tingkat nasional. Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan jumlah Keluarga Sasaran Penerima Jaminan Sosial (KSJPS) atau Kartu Menuju Sehat (KMS) 2019 sebanyak 15.282 Kepala Keluarga (KK). Jumlah itu berkurang dibandingkan penerima KMS tahun 2018 yang mencapai 17.253 KK. Sebanyak 15.282 KK penerima KMS 2019 terdiri atas kategori miskin 2.783 KK dan kategori rentan miskin 12.499 KK. Jumlah penerima KMS mengalami penurunan signifikan pada kategori miskin yang pada tahun 2018 tercatat 4.781 KK. Kategori rentan miskin pada KMS tahun 2019 bertambah, meski kecil dibandingkan tahun 2018 sebanyak 12.456 KK. (Tri, 2019).

Tujuan menyelenggarakan pendidikan daerah adalah berusaha menjamin keberlangsungan proses pendidikan. Sistem ini juga bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik di daerah, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, sehat, berilmu, cakap, kreatif, berbudaya, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis serta bertanggungjawab. (Ashari dan Asmawati, 2012).

Permasalahan pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) cukup banyak, seperti tingkat persaingan, ketimpangan data yang berhak menerima KMS, ketepatan sasaran, dan peran serta orang tua siswa yang dominan memilih sekolah. Berdasarkan pendataan, pemegang KMS yang akan melanjutkan ke jenjang SMP negeri mencapai 2.265 siswa. Hasil pemantauan Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta selama proses pendataan siswa KMS di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, masih ditemui ketidaktepatan sasaran program. Hal ini ditunjukkan dengan gaya hidup siswa KMS yang tergolong mewah sehingga semestinya tidak layak memegang KMS, antara lain siswa diantar dengan mobil, memiliki sepeda motor yang bagus serta alat komunikasi (HP) canggih (Febriarni, 2016). Demikian juga dilihat dari angka putus

sekolah setiap tahunnya, ada kecenderungan meningkat untuk tingkat SMP pada tahun 2010 dan 2011 berturut-turut 17 anak. Belum efektifnya pencapaian program JPD tersebut menjadi perhatian penting karena tantangan yang dihadapi oleh Pemkot Yogyakarta saat ini memiliki situasi yang rentan terhadap peningkatan angka putus sekolah. (Sidik, 2015).

Metode Penelitian

Penelitian evaluasi JPD ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini dipilih karena dapat menggambarkan fenomena keadaan yang sebenarnya dan diharapkan mendapatkan temuan-temuan baru yang konstruktif sehingga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian berlandaskan pada fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan sebuah ilmu pengetahuan (Ikbar, 2014). Pemilihan metode kualitatif ini bertujuan untuk melihat, mengetahui, mengamati, kemudian mendeskripsikan dengan jelas tentang apa yang terjadi pada lokus atau objek yang diteliti (Nugroho, 2014). Penelitian kualitatif mempergunakan metode argumentasi sebagai metode utama untuk menarik kesimpulan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu untuk memberikan deskripsi yang jelas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta membagi kuota bagi siswa program JPD pada masing-masing sekolah. Pembagian kuota bagi peserta program JPD berbeda-beda satu sekolah dengan sekolah lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti mengkategorikan jumlah kuota siswa program JPD menjadi tiga kategori yaitu rendah dengan interval 25-40; sedang, 41-65; dan tinggi 66-140. Dari masing-masing kategori tersebut akan diambil sampel satu sekolah dan sekaligus menjadi lokasi penelitian, yaitu: SMP Negeri 1, SMP Negeri 7, SMP Negeri 11 Kota Yogyakarta.

Teknik pengambilan sampel informan penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. (Sugiyono, 2019), *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan informan dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Informan tersebut adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah yang mengurus bidang JPD atau kurikulum, Pengurus Sekolah yang mengurus aktivitas siswa JPD, Guru Bimbingan Konseling (BK), dan siswa penerima program JPD. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik

analisis data kualitatif oleh Miles dan Huberman. Proses analisis data meliputi pengumpulan data, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Pembahasan

Fungsi pokok evaluasi adalah mendapatkan informasi yang tepat mengenai suatu program atau kegiatan. Informasi tersebut diperlukan dalam rangka menentukan apakah suatu program tersebut perlu perbaikan, dilanjutkan atau dihentikan. Hal ini penting supaya program tersebut dapat bermanfaat bagi kelompok sasaran dan tercapainya tujuan program. Evaluasi merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam setiap program termasuk program pendidikan. Model evaluasi mempunyai fungsi yang sama, yaitu menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melihat pelaksanaan program dan memberikan informasi bagi pemangku kebijakan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Context, Input, Process* dan *Product* (CIPP) yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam dkk. Model evaluasi CIPP dalam pelaksanaannya lebih banyak digunakan oleh para evaluator. Hal ini dikarenakan model evaluasi ini lebih komprehensif (holistik) jika dibandingkan dengan beberapa model evaluasi lainnya. (Djamaluddin, 2019). Model CIPP telah digunakan banyak negara terutama Amerika Serikat. Model ini merupakan kerangka kerja yang komprehensif untuk membantu melihat evaluasi proyek, program atau kegiatan lainnya baik secara formatif dan sumatif (Stufflebeam, 2003). Penilaian konteks ditujukan untuk menginformasikan keputusan perencanaan, Evaluasi Input adalah untuk melayani keputusan struktural, sedangkan Evaluasi Proses adalah untuk memandu keputusan implementasi, dan Penilaian Produk untuk melayani pengambilan keputusan ulang (Bulhayat, 2019).

Konteks (*context*), indikator pada aspek konteks dalam penelitian ini meliputi: konteks tujuan JPD; pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan; harapan, dukungan dan permintaan dari masyarakat; dan dukungan warga sekolah terhadap JPD. Pada konteks tujuan, JPD memberikan kesempatan belajar yang berkualitas bagi keluarga tidak mampu, sehingga tidak ada masyarakat usia sekolah tidak sekolah karena tidak ada biaya. Implementasi program JPD pada aspek ini masih mengalami persoalan.

Persoalan tersebut adalah pemanfaatan kartu KMS untuk akses ke sekolah negeri favorit dan ketidaktepatan sasaran penerima kartu KMS. Permasalahan pemanfaatan kartu KMS untuk akses ke sekolah negeri favorit terlihat dari beberapa informan di lapangan. Kartu KMS

dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk tujuan akses ke sekolah negeri favorit di Kota Yogyakarta. Seperti yang disampaikan infoman yang menyampaikan bahwa ada indikasi jalur JPD dimanfaatkan orang tua siswa masuk di sekolah negeri favorit karena ada jalur khusus dari JPD. Hal ini dikuatkan dengan pengamatan nanti ketika naik ke kelas 8, yang bersangkutan sudah tidak dapat KMS, awal kelas 7 hampir sejumlah 65-an siswa, kemudian turun menjadi 44 siswa yang memiliki kartu KMS. Persoalan kedua adalah permasalahan ketidaktepatan sasaran, artinya sebenarnya anak tersebut tidak layak masuk jalur KMS tetapi berhubung dia memiliki kartu tersebut sekolah hanya bisa menerima sesuai peraturan yang ada. Mengutip hasil penelitian Survei Penjaringan Aspirasi Masyarakat Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada pada 2013 menunjukkan, sebanyak 45,5 persen responden menilai kepemilikan KMS masih kurang tepat sasaran. Masih ada rumah tangga tidak mampu yang belum memiliki KMS, begitu pula sebaliknya, ada rumah tangga mampu yang justru memiliki KMS. KMS yang tidak tepat sasaran pada akhirnya akan berdampak pada efektivitas program JPD (Setianingrum, 2016).

Permasalahan lainnya adalah tentang lemahnya semangat atau motivasi belajar dan sekolah dari siswa KMS terlihat pada capaian prestasi siswa di bidang akademik. Hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah menyatakan siswa KMS relatif rendah dalam minat belajar dan sikap yang tidak mudah di atur.

Konteks pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan SMP dinilai sudah dijalankan dengan baik, walaupun masih ditemui beberapa persoalan seperti ketidaksiapan siswa untuk belajar dan sekolah. SNP pada sekolah sudah diterapkan kepada semua peserta didik tanpa membedakan antara jalur reguler maupun KMS. Hal ini merupakan tugas sekolah untuk menstandarkan mutu peserta didik. SNP juga disosialisasikan kepada semua peserta didik dan orang tua jalur reguler dan KMS. Temuan di lapangan melalui wawancara masih ditemukan kesiapan siswa dalam belajar masih rendah, artinya siswa seharusnya belajar di rumah, membawa buku pelajaran. Siswa yang aktif mengerjakan PR hanya sekitar 10% sehingga prestasi akademik dinilai cenderung rendah. Konteks harapan, dukungan, dan permintaan dari masyarakat dinilai baik. Dari hasil wawancara dengan kelompok sasaran, program ini dinilai sangat bermanfaat dalam rangka mendukung anak untuk sekolah, khususnya pembiayaan sekolah anak didik dari keluarga miskin atau pemegang KMS.

Harapan dan permintaan masyarakat menghendaki program ini tetap dilanjutkan karena kemanfaatannya dirasakan oleh keluarga KMS. Konteks dukungan warga sekolah terhadap JPD dinilai mendukung program ini. Peran sekolah dalam mendukung program JPD terlihat pada penciptaan program-program pendukung dalam kegiatan PBM dan kegiatan penunjang lainnya. Sekolah memfasilitasi peserta didik dari jalur KMS dengan memberikan pelayanan yang baik. Dari proses belajar, siswa diberikan pendampingan khusus terutama oleh guru-guru BK dalam memberikan motivasi dan arahan dalam mengikuti pembelajaran maupun kegiatan kesehariannya. Dari administrasi penukaran kwitansi atau nota kebutuhan sekolah dilakukan secara periodik dan teratur dengan baik. Bentuk dukungan program ini adalah sekolah terus berusaha mendidik dan membimbing peserta didik, khususnya jalur KMS, agar bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Sekolah membuat program pendampingan seperti “klinik” yang bertugas untuk mencari sumber masalah yang dialami oleh siswa kemudian dipantau khususnya 4 mata pelajaran pokok, jika ditemukan ada yang lemah maka guru pelajaran tersebut mencari solusi penyelesaian masalah tersebut. Program pendampingan ini diterapkan pada semua peserta didik dan lebih khusus diberlakukan pada siswa jalur KMS.

Masukan (*input*), input yang dimaksud adalah meliputi sumber dan strategi yang digunakan dalam kegiatan pendidikan. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mendukung pencapaian tujuan program JPD dan pendidikan. Indikator pada aspek input adalah meliputi kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan; sarana dan prasarana pendukung; pengelolaan; dan pembiayaan program. Aspek kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah yang menjadi sampel, dinilai sangat baik. Data tenaga pendidik beserta nilai akreditasi standar pendidik dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Data Nilai Akreditasi Tenaga Pendidik

Sekolah	Total Guru	PNS	Honorer	Nilai
SMP N 11	22	17	5	88
SMP N 7	29	24	5	91
SMP N 1	43	34	9	94

Sumber: diolah peneliti dari
<http://sekolah.data.kemdikbud.go.id>

Dari hasil wawancara, kesiapan tenaga pendidik dalam mendukung program JPD terlihat pada kegiatan-kegiatan yang diciptakan untuk mengejar ketercapaian SNP di sekolah. Peran guru khususnya guru BK sangat dituntut lebih kreatif dan perhatian terhadap peserta didik khususnya dari jalur JPD. Pendampingan seperti memberi motivasi kepada peserta didik dilakukan terus-menerus, dengan memposisikan mereka seperti peserta didik lainnya. Memberikan motivasi berarti bahwa mereka juga mampu baik kemampuan akademik maupun prestasi lainnya. Demikian juga pada sumber tenaga kependidikan. Hasil wawancara dengan tenaga kependidikan menunjukkan, kompetensi dalam melayani peserta didik jalur JPD dinilai baik. Admin pengelola keuangan dan laporan JPD tidak menemui kendala yang berarti. Model laporan yang diinginkan oleh Dinas Pendidikan dapat dibuat dan diselesaikan dengan baik. Kesiapan dari tenaga kependidikan dalam melayani kebutuhan dari peserta didik, sekolah dan Dinas Pendidikan dapat dilakukan dengan baik. Aspek sarana dan prasarana pendukung, data yang didapatkan di lapangan, menunjukkan bahwa kondisi atau keberadaan sarana dan prasarana sekolah sudah dinilai baik dan mendukung tercapainya tujuan program JPD. Sarana prasarana pokok yang harus ada dan dibutuhkan peserta didik antara lain ruangan kelas, laboratorium, perpustakaan, sanitasi, dan sarana pendukung lainnya, seperti fasilitas olah raga. Dari hasil observasi tiga sampel sekolah yang digunakan dalam penelitian ini, fasilitas sarana prasarana terlihat baik dan mendukung program pendidikan dan program JPD.

Tabel 2. Data Nilai Akreditasi Sarpras Sekolah

Sekolah	Ruang Kelas	Nilai
SMP N 11	14	94
SMP N 7	20	96
SMP N 1	25	100

Sumber: diolah peneliti dari
<http://sekolah.data.kemdikbud.go.id>

Dari data tersebut terlihat bahwa nilai standar sarana prasarana sangat baik, hal ini dibutuhkan dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah dan menciptakan lingkungan sekolah yang baik. Aspek pengelolaan program JPD pada satuan pendidikan yang menjadi sampel dinilai baik. Di lapangan memang ditemukan keluhan-keluhan dari pengelola atau admin JPD. Keluhan-keluhan tersebut antara lain perubahan dari tahun pelaporan ke tahun anggaran

sehingga berdampak pada perolehan biaya pendidikan siswa. Dilihat dari sistem pengelolaan, program JPD ini sudah ada perbaikan. Admin dimudahkan dalam pengelolaan pelaporan program JPD. Perubahan tersebut antara lain perubahan dari manual (berkas *hardcopy*) berubah menjadi digital (*softcopy*). Termasuk di dalamnya data siswa, sekolah dapat melihat data dari *Jogja Smart Sevice* (JSS), dengan cukup menginput Nomor Induk Kependudukan (NIK), maka terlihat status siswa yang bersangkutan. Dari sampel ketiga sekolah yang menjadi obyek penelitian menunjukkan secara umum, pengelolaan program pendidikan dan program-program yang lain termasuk JPD, dikelola dengan baik, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Data Nilai Akreditasi Standar Pengelolaan

Sekolah	Nilai
SMP N 11	99
SMP N 7	95
SMP N 1	100

Sumber: Diolah peneliti dari <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id>

Aspek pembiayaan program JPD, berasal dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pendidikan. Dari hasil wawancara dengan pengelola JPD di sekolah pengelolaan pembiayaan, tidak ditemukan masalah yang berarti. Sekolah telah memberikan arahan atau panduan kepada siswa dan orang tua tentang hal apa saja yang boleh dibeli atau yang tidak boleh dibeli. Batasan-batasan tersebut memberikan pengaruh pada pembelian barang sesuai kebutuhan siswa. Demikian juga untuk layanan penukaran nota pembelian, sekolah memberikan waktu tertentu agar pengadministrasian nota atas pembiayaan dapat dilakukan dengan baik. Data nilai pada standar pembiayaan di masing-masing satuan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Data Nilai Akreditasi Standar Pembiayaan

Sekolah	Nilai
SMP N 11	96
SMP N 7	100
SMP N 1	89

Sumber: diolah peneliti dari <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id>

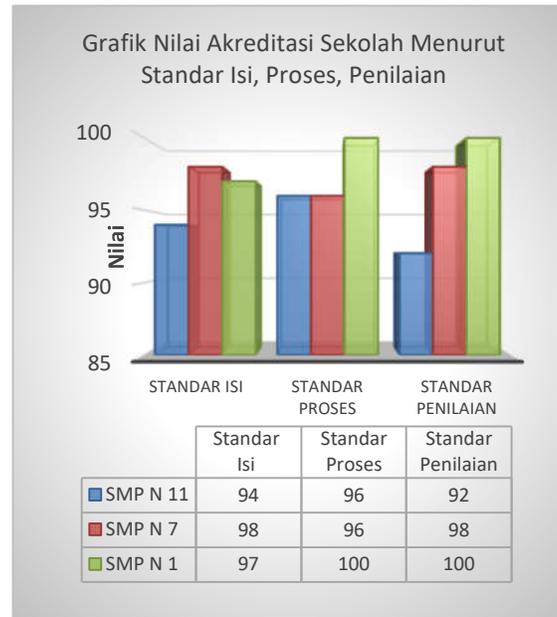
Proses (*process*), evaluasi proses melihat kegiatan program meliputi kegiatan penyaluran dana jaminan pendidikan dan proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh satuan SMP dengan melihat 3 indikator, yaitu isi, proses, dan penilaian seperti pada pedoman Standar Pendidikan Nasional. Pada aspek penyaluran dana jaminan pendidikan dinilai baik. Dari hasil wawancara dengan beberapa informan didapatkan informasi bahwa proses penyaluran dana jaminan pendidikan dapat berlangsung dengan baik, dan tidak ada kendala yang berarti. Mereka menilai bahwa mekanisme yang sekarang ada sudah relatif baik. Siswa membelanjakan atau membeli barang kebutuhan sekolah, kemudian nota pembelian barang tersebut dapat ditukar dengan uang di sekolah. Hal ini dilakukan sebagai fungsi kontrol bagi sekolah dalam proses penyaluran dana jaminan pendidikan. Temuan permasalahan adalah ketidaksamaan keinginan antara anak dan orang tua dengan arahan pihak sekolah. Tekadang pembelian barang tidak sesuai dengan kebutuhan, dan hanya mempertimbangkan keinginan, seperti membeli sepatu dan tas bermerek yang harganya mahal. Peran sekolah akan memberikan arahan dan memberikan solusi apa yang diperlukan dalam pembelian barang sesuai kebutuhan siswa. Hasil wawancara dengan informan menunjukkan model penyaluran dana JPD melalui mekanisme menukar nota. Hal ini sebagai mekanisme penyaringan nota yang diajukan oleh siswa atau orang tua tentang pembelian barang. Kelengkapan nota tersebut meliputi nama toko, jenis barang, harga barang harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.

Aspek proses pembelajaran meliputi isi, proses, dan penilaian yang dinilai belum optimal. Dari hasil data wawancara dan data sekunder, rata-rata siswa-siswa pada jalur JPD memiliki keterbatasan ekonomi dan kemampuan akademik. Banyak siswa jalur JPD mempunyai kemampuan akademik lebih rendah atau tidak sama dengan siswa jalur reguler. Di samping itu, beberapa siswa mempunyai perilaku yang tidak baik, seperti tidak minat sekolah, suka membolos, bandel, nakal, dan terlihat tidak ada motivasi bersekolah. Hal ini sejalan dengan hasil FGD Penanganan Siswa Rawan Putus Sekolah dari Keluarga Pemegang KMS yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Masih ada kasus-kasus putus sekolah di Kota Yogyakarta. Persoalannya bukan lagi karena ketiadaan biaya, melainkan karena rendahnya minat sekolah atau belajar. Beberapa kasus putus sekolah terjadi karena anak tidak lagi minat atau bersemangat untuk bersekolah. Mereka lebih memilih untuk bekerja mencari uang daripada harus bersekolah (Setianingrum, 2016). Rendahnya minat sekolah juga ditemukan di semua sampel pada penelitian ini, seperti hasil wawancara dengan Ibu Dra.Tri Sakti, MSi.,

sebagai guru BK di SMP Negeri 1 Kota Yogyakarta. Beliau menyatakan keberadaan siswa jalur JPD banyak ditemui kurang dalam motivasi untuk sekolah. Hal ini ditengarai karena kondisi sosial ekonomi mereka yang tidak mendukung untuk bersekolah. Kondisi ekonomi yang terbatas, mengharuskan mereka harus ikut membantu keluarga untuk mencari nafkah, seperti membantu berdagang. Kondisi lingkungan tempat tinggal juga memperparah kondisi ini, seperti pergaulan dengan teman-temannya yang suka bergadang atau aktivitas lainya yang tidak menciptakan kondisi yang baik untuk belajar. Dari beberapa masalah atau kendala tersebut, peran sekolah sebagai institusi pendidikan dituntut tidak hanya mendidik, tetapi mendampingi dan memberikan motivasi kepada siswa-siswa jalur KMS. Di sinilah peran guru-guru BK dalam membimbing dan memberikan pendampingan kepada siswa tersebut supaya bersemangat untuk belajar dan bersekolah. Proses pendampingan tersebut diwujudkan dengan memberikan motivasi pentingnya belajar, mengadakan kegiatan *talk show* dengan menghadirkan lulusan sekolah jalur KMS yang dipandang sukses.

Upaya-upaya yang dilakukan sekolah membawa hasil yang positif. Hal tersebut membawa hasil siswa menjadi lebih bersemangat untuk belajar walau belum semua berubah, tetapi cukup membawa perubahan yang ditunjukkan dengan keberhasilan memperoleh nilai akreditasi. Keberhasilan sekolah dalam proses pendampingan tersebut dapat dilihat dari prestasi sekolah dalam capaian akreditasi. Dilihat dari standar isi, proses, penilaian, pada sampel 3 sekolah yang menjadi obyek penelitian didapatkan nilai yang sangat baik. Standar Isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan SMP. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Berikut data nilai akreditasi sekolah menurut standar isi, proses, dan penilaian:

Gambar 1. Nilai Akreditasi Standar Isi, Proses, Penilaian



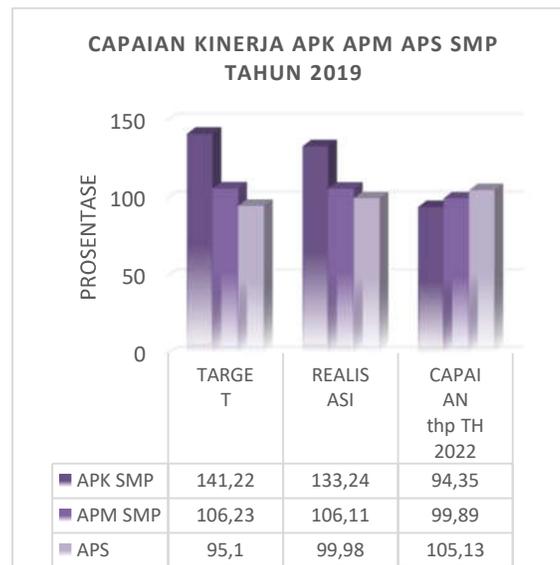
Sumber: diolah peneliti dari <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id>

Melihat data tersebut, sekolah sebagai institusi pendidikan secara eksplisit telah menunjukkan keberhasilan dalam memenuhi standar, baik di standar isi, proses dan penilaian. Hal ini tentu saja meliputi semua peserta didik termasuk di dalamnya siswa jalur KMS. Angka kecukupan bagi siswa yang ditunjukkan dalam nilai akreditasi tersebut mengandung arti bahwa siswa KMS memenuhi standar yang ditetapkan. Perbaikan terhadap program JPD adalah bagaimana mengatasi kondisi siswa yang tidak siap untuk belajar karena faktor ekonomi, keluarga dan lingkungan. Perlu adanya proses pendampingan dari keluarga dan masyarakat serta sarana belajar bagi siswa. Hal ini dapat diciptakan atau mengaktifkan program pendukung, seperti Jam Belajar Masyarakat (JBM) dan pendampingan belajar dalam kelompok belajar.

Produk (*product*), bertujuan untuk menilai hasil dari program JPD. Tahap produk merupakan tahap terpenting dalam menentukan apakah suatu program dilanjutkan atau dihentikan. Pada penelitian ini, evaluasi produk meliputi capaian tujuan JPD dan peningkatan kompetensi lulusan yang merupakan tujuan dari SNP pada SMP. Capaian tujuan JPD, dari hasil wawancara dengan informan rata-rata mereka menyampaikan bahwa tujuan untuk membuka akses pendidikan bagi keluarga pemegang kartu KMS agar dapat mengenyam pendidikan tanpa kendala biaya bisa tercapai. Program ini dianggap bisa memutus rantai kemiskinan melalui

sektor pendidikan. Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 11 Yogyakarta, Amelan, SPd., yang menyampaikan bahwa tujuan jangka panjang JPD sudah tercapai, dengan pelaksanaan program ini sudah relatif lama dan tetap dipertahankan. Artinya, kebermanfaatan program ini baik. Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan mampu menyelenggarakan pendidikan kepada siapapun yang membutuhkan, baik golongan mampu maupun tidak mampu dari sisi ekonomi. Di samping itu, program ini sangat membantu masyarakat terutama anak usia sekolah dapat menikmati sekolah secara gratis dan mendapatkan biaya tambahan untuk mendukung kegiatan belajar. Ketercapaian tujuan JPD terlihat dari data Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Capaian kinerja APK, APM, dan APS di Kota Yogyakarta dinilai baik. Nilai APK dan APM Kota Yogyakarta yang melebihi 100% menunjukkan bahwa cukup banyak penduduk luar Kota Yogyakarta yang bersekolah di Kota Yogyakarta. Hal ini terjadi karena kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta masih unggul dan menjadi rujukan tidak hanya bagi warga Kota Yogyakarta, namun juga menjadi rujukan bagi masyarakat di Kabupaten lain di DIY (LKJIP, 2019). Hal ini dapat terlihat pada gambar grafik berikut:

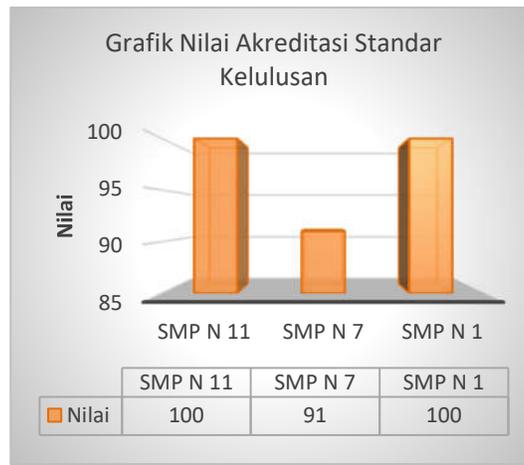
Gambar 2. Capaian Kinerja APK, APM, APS Tahun 2019



Sumber: diolah peneliti dari LkjIP Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2019

Aspek produk peningkatan kompetensi lulusan pada penelitian ini dinilai baik. Tercapainya SNP menjadi sangat penting, karena menjadi indikator capaian peserta didik. SNP digunakan tidak hanya pada proses selama siswa sekolah tetapi juga merupakan standar kompetensi lulusan. Data standar kelulusan sekolah yang menjadi sampel penelitian, menunjukkan nilai akreditasi yang sangat baik, seperti tampak pada gambar berikut ini:

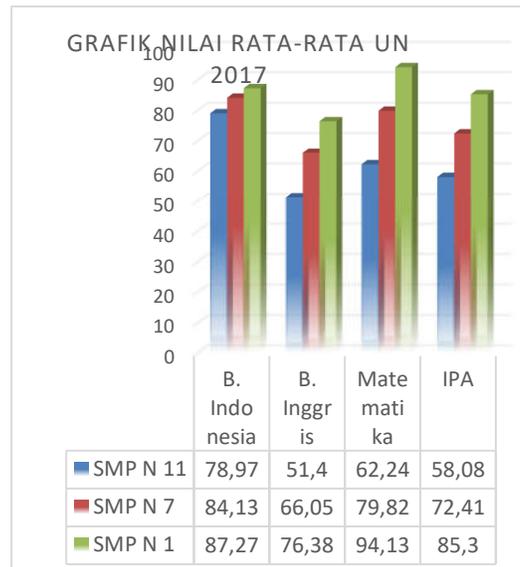
Gambar 3. Grafik Capaian Nilai Akreditasi Standar Kelulusan



Sumber: diolah penelitian dari:
<http://sekolah.data.kemendikbud.go.id>

Melihat data tersebut, sekolah sudah menjalankan fungsi sebagai tempat mendidik siswa sehingga mempunyai kualifikasi kemampuan yang baik. Dalam penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Lebih jauh, capaian nilai rata-rata UN di sekolah yang menjadi sampel penelitian menunjukkan hasil yang baik. Data rata-rata UN dapat terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar 4. Grafik Nilai Rata-Rata UN 2017



Sumber: diolah peneliti dari <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id>

Keberhasilan capaian kompetensi lulusan tersirat pada hasil wawancara dengan beberapa informan. Kompetensi lulusan siswa KMS sudah sesuai dengan standar SNP yang menjadi ukuran di setiap sekolah. Sekolah sudah berhasil mengantarkan dan mengentaskan mereka dengan lulus di jenjang SMP. Proses pembelajaran sejak awal diberlakukan sama antara siswa jalur reguler dengan jalur KMS. Penanganan siswa yang dirasa kurang dalam bidang akademik, diberlakukan sama dan tidak dibeda-bedakan satu dengan yang lain.

Berdasarkan data laporan kinerja Dinas Pendidikan, kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat. Tolok ukur capaian sasaran tersebut diukur dengan indikator Rerata UNSMP/MTs. Kinerja sasaran Kualitas Lulusan Pendidikan Dasar Meningkat dengan indikator Rerata UN SMP/MTs pada tahun 2019 dapat terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Data Target dan Realisasi Kinerja UN 2019

Indikator	Realisasi 2018	2019			Capaian 2022
		Target	Realisasi	%Realisasi	
Rerata UN SMP	68,39	67	71,83	107,21%	102,61 %

Sumber: diolah peneliti dari LKJIP Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2019

Nilai realisasi rerata UN Kota Yogyakarta tahun 2019 telah melampaui target yang ditetapkan. Selain melampaui target, capaian rerata UN SMP juga meningkat dari tahun 2018. Dari hasil wawancara dan data tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan kompetensi lulusan dinilai baik. Dengan rata-rata keterbatasan kemampuan akademik dari siswa KMS, sekolah telah berhasil mendidik siswa tersebut mencapai standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian evaluasi program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) di SMP Negeri Kota Yogyakarta dengan model evaluasi Stufflebeam, dapat digambarkan bahwa secara umum pelaksanaan JPD di satuan pendidikan SMP Negeri Kota Yogyakarta dinilai baik. Secara rinci dari model evaluasi Stufflebeam, pada kriteria konteks dan proses belum optimal. Persoalan kriteria konteks adalah masih terdapatnya indikasi masyarakat memanfaatkan kartu KMS untuk tujuan memasukan anak di sekolah favorit dan ketidaktepatan sarasan atas pemegang kartu KMS. Persoalan lain pada kriteria proses, khususnya proses pembelajaran ditemukan lemahnya semangat belajar dan sekolah, ditunjukkan dengan peserta didik tidak siap untuk mengikuti proses pembelajaran di sekolah, malas, sulit diatur, membolos, dan tidak mengerjakan tugas PR. Kriteria lainnya, yaitu input dan produk dinilai baik.

Peneliti merekomendasikan bahwa program JPD tetap dilanjutkan dengan perbaikan. Sarannya adalah adanya perbaikan penyempurnaan proses mendapatkan kartu KMS dengan memanfaatkan perangkat RT dan RW, kelurahan, dan kecamatan dalam merekomendasikan masyarakat yang layak mendapatkan KMS; pendampingan peserta didik di masyarakat dengan melibatkan pemuda dan orang tua di lingkungan tempat tinggal siswa KMS; Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar bagi anak sekolah dengan mengaktifkan kembali program-program pendukung seperti Jam Belajar Masyarakat (JBM), sehingga diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran pentingnya pendidikan untuk masa depannya nanti. Program JPD harus didukung oleh pihak terkait untuk mengatasi kondisi siswa yang tidak siap unruk belajar karena faktor ekonomi, keluarga dan lingkungan.

Daftar Pustaka

- Ashari dan Asmawati. (2012). *Jaminan Pendidikan Daerah Bagi Pemegang KMS Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Initiatives for Governance Innovation, UGM.
- Bulhayat. (2019). Evaluasi Model CIPP Pada Implementasi KTSP Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Jombang. *Jurnal al-Adabiya*, Vol 14 No 1 : 85-102.
- Djamaluddin, M. (2019). Evaluasi Program Praktik Industri (PI) Di Program Studi Pendidikan Teknik Informatika Dan Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. *Celebes Computer Science Journal*, Vol 1 no 1 : 1-12.
- Febriarni, U. (2016, Juni 13). *www.solopos.com*. Diambil kembali dari *www.solopos.com*: <https://www.solopos.com/pendidikan-kota-jogja-masih-ditemukan-pemegang-kms-berpenampilan-mewah-728301>
- Ikbar, Y. (2014). *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: Refika Aditama.
- LKJIP. (2019). *Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LkjIP) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
- Notoatmodjo, S. (2003). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Nugroho, R. (2014). *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setianingrum, T. (2016, Januari 12). <https://cpps.ugm.ac.id/>. Diambil kembali dari <https://cpps.ugm.ac.id/>: <https://cpps.ugm.ac.id/jpd-kota-yogyakarta-bukan-kendala-biaya-putus-sekolah-akibat-rendahnya-minat-sekolah/>
- Sidik, F. (2015). Implementasi Program Jaminan Pendidikan Daerah di Kota Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik Vol 19 No 1*, 27-42.
- Stufflebeam. (2003). The CIPP Model for evaluation, the article presented at the 2003 annual conference of the Oregon Program Evaluator Network (OPEN). <http://www.wmich.edu/evalctr/cippmodel>. , 2.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kalitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tri. (2019, Januari 21). *www.harianmerapi.com*. Diambil kembali dari *www.harianmerapi.com/news*: (<https://www.harianmerapi.com/news/2019/01/21/49300/penerima-kms-2019-ditetapkan-15-282-kk-kategori-rentan-miskin-bertambah> diakses 23 Juli 2019 pukul 20:12)